

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)  
KOTA PARIAMAN**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**ATIKA  
2018/18133014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

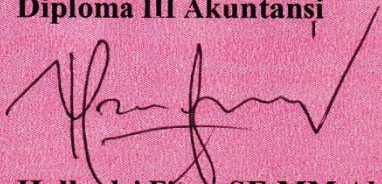
**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)  
KOTA PARIAMAN**

**Nama** : Atika  
**BP/NIM** : 2018/18133014  
**Program Studi** : Akuntansi (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, November 2021**

**Diketahui Oleh :**  
**Koordinator Program Studi**  
**Diploma III Akuntansi**



**Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA**  
**NIP. 198008092010121003**

**Disetujui Oleh :**  
**Pembimbing Tugas Akhir**



**Vanica Serly, SE, M.Si**  
**NIP. 198612292015042002**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

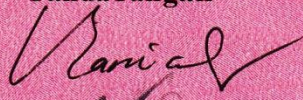

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)  
KOTA PARIAMAN**

**Nama** : Atika  
**BP/NIM** : 2018/18133014  
**Program Studi** : Akuntansi (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

**Padang, November 2021**

**Tim penguji,**

	<b>Nama</b>	<b>TandaTangan</b>
<b>Ketua</b>	<b>Vanica Serly, SE, M.Si</b>	
<b>Anggota</b>	<b>Vita Fitria Sari, SE, M.Si</b>	
<b>Anggota</b>	<b>Dian Fitri Handayani, SE, M.Sc</b>	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atika  
Thn. Masuk/NIM : 2018/18133014  
Tempat/Tgl. Lahir : Sicincin/ 26 Agustus 1999  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Ladang Laweh Sicincin  
Hp : 085263828727

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2021

Yang menyatakan,



*Atika*  
**Atika**

BP/NIM. 2018/18133014

## **ABSTRAK**

**Atika : Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)  
Kota Pariaman**

**Pembimbing : Vanica Serly, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman. Penerapan akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian serta pengungkapan aset tetap.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari instansi terkait yang sudah diolah dan terdokumentasikan yang terdiri dari laporan keuangan BPKPD Kota Pariaman Tahun 2020. Selanjutnya data yang sudah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan teori-teori yang relevan, guna memperoleh hasil yang terkait dengan pelaksanaan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 07). Namun, pada pelaksanaan penghapusan aset tetap diharapkan kedepannya dapat dilaksanakan lebih baik lagi dan berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci : Penerapan PSAP 07, Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Penghentian dan Pelepasan, Pengungkapan**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA PARIAMAN”.

Tugas akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar ahli madya pada Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tak terbatas. terselesainya Tugas Akhir ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Vanica Serly, SE, M.Si. selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Nikmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Teristimewa kepada ibunda Yus Lizar dan ayahanda Sudirman serta semua keluarga besar penulis yang tidak pernah hentinya memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini

meskipun banyak kendala yang penulis temukan namun dengan doa kedua orang tua dan semua keluarga besar lah yang mempermudah urusan yang penulis temui dan semua ini atas izin Allah SWT .

3. Kepada Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Kepada Bapak Halkadri Fitra SE, MM, Ak, selaku ketua program studi diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Pustakawan/wati Universitas Negeri Padang.
5. Kepada Ibu Vanica Serly, SE, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan kemudahan serta masukan kepada penulis atas kekurangan yang selama ini penulis dapati.
6. Kepada Divo Dwi Septian Syara, SH yang selalu mendoakan, menguatkan, memberi semangat dan motivasi yang besar saat lelah dan rasa cemas menghampiri penulis.
7. Kepada teman-teman seperjuanganku terkhususnya (Celshia Rahmi A.Md, Dika Yulistia A.Md, Azizah Dwi Yanti A.Md, Felia Salsabila Irwan A.Md Dillanof Yandita A.Md) yang telah sama-sama berjuang, memberikan masukan dan memberikan semangat juga kekuatan kepada penulis.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mensupport penulis.
9. Kepada diriku sendiri terimakasih sudah bertahan sampai saat ini dan semangat untuk kedepannya, percayalah hidup akan jauh lebih indah jika kita berusaha dan selalu bersyukur.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena penulis hanya lah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, segala kritik dan saran penulis harap berguna untuk meningkatkan mutu dari penulisan tugas akhir ini. Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan di masa yang mendatang sesuai dengan fungsinya.

*Wassalamu,alaikum wr.wb*

Padang, Oktober 2021

Atika

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR TABEL .....	vii
LAMPIRAN .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah .....	6
Tujuan Penelitian.....	6
Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
1. Aset .....	8
A. Pengertian Aset.....	8
B. Klasifikasi Aset .....	9
2. Akuntansi Aset Tetap.....	10
A. Pengertian Aset Tetap .....	10
B. Klasifikasi Aset Tetap .....	11
C. Perolehan Aset Tetap.....	13
D. Pengakuan Aset Tetap .....	15
E. Pengukuran Aset Tetap .....	16
F. Kapitalisasi Aset Tetap.....	17

G. Penyusutan Aset Tetap .....	19
H. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap .....	24
I. Pengungkapan Aset Tetap .....	26
J. Penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan (Neraca).....	27
3. Jurnal .....	27
BAB III .....	35
METODOLOGI PENELITIAN .....	35
A. Bentuk Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Tempat Penelitian .....	35
C. Rancangan Penelitian .....	36
BAB IV .....	39
PEMBAHASAN .....	39
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.....	39
B. Temuan dan Pembahasan .....	41
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN.....	61

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Daftar Aset Tetap BPKPD Kota Pariaman .....	4
Tabel 4. 1 Ikhtisar Kesesuaian Pengakuan Aset Tetap BPKPD Kota Pariaman dengan PSAP 07.....	44
Tabel 4. 2 Ikhtisar Kesesuaian Pengukuran Aset Tetap BPKPD Kota Pariaman dengan PSAP 07.....	46
Tabel 4. 3 Ikhtisar Kesesuaian Penyusutan Aset Tetap BPKPD Kota Pariaman dengan PSAP 07.....	48
Tabel 4. 4 Daftar Penghapusan Beserta Penyusutan BPKPD Kota Pariaman .....	51
Tabel 4. 5 Ikhtisar Kesesuaian Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap BPKPD Kota Pariaman dengan PSAP 07 .....	54
Tabel 4. 6 Ikhtisar Kesesuaian Pengungkapan Aset Tetap BPKPD Kota Pariaman dengan PSAP 07.....	56

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Observasi .....	61
Lampiran 2 Surat Balasan dari Tempat Observasi.....	62
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Pariaman Tahun 2020...	63
Lampiran 4 Laporan Operasional BPKPD Kota Pariaman Tahun 2020.....	64
Lampiran 5 Laporan Perubahan Ekuitas BPKPD Kota Pariaman Tahun 2020 ....	66
Lampiran 6 Neraca BPKPD Kota Pariaman Tahun 2020 .....	67
Lampiran 7 SK Penghapusan BPKPD Kota Pariaman Tahun 2020 .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penerapan akuntansi pada organisasi sektor publik saat ini mendapat perhatian berbagai pihak di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan reaksi masyarakat yang mulai menyadari arti penting pelaporan dan penggunaan akuntansi pada berbagai sektor dalam perekonomian, termasuk untuk lembaga pemerintahan dan juga lembaga nonprofit lainnya dalam rangka penegakan *Good Governance* (Adriati N, 2009). Tata pemerintahan yang baik di sektor publik (*Good Public Governance*) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2010).

Upaya pemerintah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan karena adanya tuntutan publik agar pemerintah mengelola secara profesional dan efisien. Aparat pemerintah diminta untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas serta dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan. (Afrianti:21).

Dengan diterbitkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari dua belas pernyataan standar akuntansi pemerintah, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Salah satu dari dua belas pernyataan akuntansi pemerintah tersebut, terdapat satu standar yang secara khusus mengatur pengelolaan aset tetap, standar tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap. Tujuan dari standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Aset tetap merupakan unsur penting yang memerlukan pengelolaan yang baik untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang milik daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemanfaatan aset daerah yang ada serta digunakan untuk dasar penyajian laporan keuangan pemerintah. Aset tetap perlu dikelola dengan baik sehingga pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, efisien dapat terwujud, serta adanya kepastian nilai yang berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. (Yusuf, 2011: 11)

Aset tetap menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 4 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kriteria dari aset yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dikelompokkan sebagai perlengkapan (Erlina,dkk, 2015)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada diwilayah pemerintahan kota Pariaman yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. BPKPD Kota Pariaman memiliki jumlah aset yang sangat banyak dan beragam, hal ini menyebabkan pencatatan aset yang dimiliki menjadi lebih sulit. Adapun aset tetap yang dimiliki oleh BPKPD Kota Pariaman adalah tanah, gedung dan bangunan, mesin, dan lain-lain. Berikut disajikan penggunaan total aset tetap berdasarkan data laporan keuangan.

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Aset Tetap BPKPD Kota Pariaman**  
**Per 31 Desember 2020**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tanah	41.650.000
2	Peralatan dan Mesin	5.717.329.875
3	Gedung dan Bangunan	6.879.623.735
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	149.777.000
5	Aset Tetap Lainnya	4.648.800.000
	<b>Jumlah</b>	<b>12.793.029.410</b>

*Sumber : Neraca BPKPD Kota Pariaman Tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Aset Tetap memiliki nilai yang relatif cukup besar sehingga aset tetap harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi terhadap aset tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam pelaporan keuangan.

Selama proses kegiatan magang, penulis menemui permasalahan yang terjadi pada BPKPD Kota Pariaman, yaitu saat pengecekan fisik barang aset terdapat beberapa aset yang terdaftar sulit ditemukan seperti: komputer, laptop, dan printer. Hal ini terjadi karena aset-aset tersebut tidak langsung dicatat saat aset tersebut berpindah maupun rusak dan tidak digunakan lagi. Sebagai instansi pemerintahan, BPKPD Kota Pariaman harus memiliki sistem, metode dan prosedur yang memadai sebagai bentuk antisipasi akan adanya kesalahan yang terjadi dalam pencatatan laporan aset tetap. Oleh karena itu, acuan dalam pencatatan laporan aset tetap dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku, dalam

hal ini penulis ingin melihat kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah PSAP Nomor 07 terhadap BPKPD Kota Pariaman.

Aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah daerah karena nilainya yang sangat signifikan dalam Neraca (Winarno, dalam Lauma dkk, 2012:84). Penilaian aset sangat penting bukan hanya dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindah tanganan aset milik daerah yang dilelang, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan penyajian laporan keuangan daerah. Setiadi (dalam lauma dkk, 2012:84) menyatakan bahwa jika aset tetap tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Laporan Keuangan (BPK). Hal ini dikarenakan, aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan. Jika ruang lingkup pemeriksaan sampai pada penerapan penyusutan aset tetap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, besar kemungkinan akan berdampak negatif pada perubahan opini atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik mengamati tentang penerapan akuntansi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman. Untuk itu, penulis akan membuat Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penulisan latar belakang sebelumnya yang menjadi rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah “Apakah penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07”, pokok yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimanakah pengakuan aset tetap pada BPKPD Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah pengukuran aset tetap pada BPKPD Kota Pariaman?
3. Bagaimanakah penyusutan aset tetap pada BPKPD Kota Pariaman?
4. Bagaimanakah penghentian dan pelepasan aset tetap BPKPD Kota Pariaman?
5. Bagaimanakah pengungkapan aset tetap BPKPD Kota Pariaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana pengakuan aset tetap pada BPKPD Kota Pariaman.
2. Mengetahui bagaimana pengukuran aset tetap pada BPKPD Kota Pariaman.
3. Mengetahui bagaimana penyusutan aset tetap pada BPKPD Kota Pariaman.
4. Mengetahui bagaimana penghentian dan pelepasan aset tetap pada BPKPD Kota Pariaman.

5. Mengetahui bagaimana pengungkapan aset tetap pada BPKPD Kota Pariaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai aset tetap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman untuk meningkatkan kualitas dalam menyusun kebijakan mengenai aset tetap dimasa mendatang.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi kepustakaan pihak-pihak yang akan memperdalam tentang penerapan akuntansi aset tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 PSAP 07, yaitu aset tetap diakui ketika memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, dan digunakan dalam operasi normal entitas.
2. Pengukuran aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 PSAP 07, yaitu aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan.
3. Penyusutan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 PSAP 07, yaitu metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus dan nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
4. Penghentian dan pelepasan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman telah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 PSAP 07, yaitu Aset yang dihentikan terjadi karena habis masa manfaat, kejadian luar biasa serta hilang dan metode penghentian yang dapat digunakan antara lain dijual, tukar tambah atau dibuang. BPKPD Kota Pariaman menggunakan metode dibuang atau dalam artian dihapus dari data inventaris. Namun pada proses pelaksanaan penghapusan belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terkendala dengan para pengurus barang yang tidak rutin menyampaikan informasi aset yang rusak dan hilang kepada bidang aset, oleh sebab itu pada saat pengecekan fisik barang aset ada beberapa barang aset tidak diketahui keberadaannya.

5. Pengungkapan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 PSAP 07, yaitu dasar penilaian digunakan untuk menentukan nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada atau mutasi aset tetap lainnya serta Informasi menyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto seta penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh BPKPD Kota Pariaman, diharapkan kedepannya dapat dilaksanakan lebih baik lagi dan berjalan dengan optimal.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman perlu mewajibkan kepada setiap pengurus barang agar selalu menyampaikan data barang yang akan dihapuskan secara berkala dan sesuai dengan waktu yang ditentukan agar proses penghapusan dapat dilakukan secara cepat dan efisien, serta barang yang akan dihapuskan tidak menumpuk maupun terbengkalai.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi data penelitian terkait dengan penghapusan aset tetap agar dapat dikupas secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Kusufi, M. Syam. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 09*. Akuntansi Aset Tetap. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, Akuntansi Aset Tetap*
- Rudianto. (2009). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2014). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15*. Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. Jakarta
- Regel, Hendrykar Avaldo, dkk . 2018. " *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara* ". Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 34-40. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Carolina, dkk. 2019. " *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado* ". Indonesia Accounting Journal Vol.1 No.2, 74-80. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Carl S. Warren, dkk. 2015. *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ali, Rukiah Rahman, dkk . 2017. " *Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Gorontalo* ". Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol.8, No.2. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Saraswati, Meigisanda Trias, dkk . 2017. " *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Penyusunan Neraca pada Pemerintahan Kabupaten Madiun* ". Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol.6, No.2. Madiun: Universitas PGRI Madiun.